

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah melaksanakan pembangunan diberbagai sektor baik bidang ekonomi, politik, sosial, dan bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan bangsa yang adil dan sejahtera. Masalah membiayaan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh suatu negara. Dalam rangka mendapatkan pembiayaan dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Indonesia itu sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dimana uang pajak tersebut digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan umum. Rakyat yang mebayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

Pajak adalah salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Pembayaran pajak ini sudah diatur oleh undang-undang sehingga setiap negara wajib untuk membayarkan pajak. Dalam UUD 19945 pasal 23 ayat 2 yang menjelaskan bahwa “pajak atau iuran

wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah”. Meskipun pajak bersifat wajib, para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Namun, pemerintah wajib memberikan imbalan secara tidak langsung kepada rakyat dengan melakukan pembangunan sarana dan prasana secara merata demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia ada dua Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah” seseorang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 unit akan dikenakan pajak yang disebut dengan pajak progresif. Kendaraan tersebut biasanya berupa mobil ataupun motor. Semakin banyak kendaraan pribadi yang dimiliki seseorang maka semakin besar pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan. Kebijakan tarif Pajak Progresif kendaraan bermotor diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor ini dikenakan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan memepertimbangkan asas kemampuan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Alasan ini muncul untuk mempersiapkan pemerintah dengan transportasi umum dengan makin tingginya angka kepemilikan kendaraan pribadi. Tanda dikenal dengan pajak progresif adalah adanya kode berupa angka dibagian atas STNK. Kode itu adalah menjadi

bukti pembayaran pajak progresif kendaraan. Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 2008 tahun 2009 Pajak daerah dan Retribusi daerah mengatur bahwa “pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi baik roda dua maupun roda empat berdasarkan atas nama dan alamat pemilik yang berbeda, maka dikenakan tarif Pajak Progresif pajak ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum”.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kantor Bersama Samsat Buleleng)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kantor Bersama Samsat Buleleng)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

“Untuk Mengetahui Mekanisme Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1) Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan kesempatan yang baik untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah secara teoritis pada lingkungan pekerjaan.

2) Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi buku di perpustakaan dan dapat digunakan sebagai pembandingan bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian, khususnya mengenai Mekanisme Pembayaran Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3) Kantor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan demi perkembangan dan kemajuan pada Mekanisme Pembayaran Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah